



KERANGKA ACUAN KERJA  
PEMBUATAN APLIKASI GAJI ONLINE

KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DATA  
KEPEGAWAIAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

(1.20.1..20.10.27.0024.5.2.2.21.05)



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

2015

# KERANGKA ACUAN KERJA

## PEMBUATAN APLIKASI GAJI ONLINE

### A. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen PNS Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKD mempunyai fungsi sebagai perencana, pengembang, dan pelayan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud bila didukung sistem tata kerja yang jelas, rinci serta dukungan Sumber Daya Manusia berkualitas dan handal yang dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam organisasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Bab XII tentang Sistem Informasi ASN dimana untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN setiap Insatansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN . Untuk mendukung kebijakan tersebut, dipandang perlu dikembangkan Sistem Informasi Data Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Grand Desain Reformasi Birokrasi yaitu Sistem Informasi yang terintegrasi

Sistem Informasi Data Kepegawaian merupakan pengembangan dari SIMPEG BKD yang dibentuk dan disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap.

Berpedoman pada pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan dalam pengelolaan gaji, BKD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tanggung jawab untuk memproses perubahan daftar gaji berdasarkan bukti-bukti dokumen yang sah yang disampaikan SKPD, melakukan pemutakhiran data perubahan daftar gaji PNS dan data lainnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, mencetak dan menyampaikan daftar gaji bulan berikutnya yang diproses kepada bendahara pengeluaran SKPD.

Berkaitan dengan tanggung jawab BKD Provinsi Jawa Tengah mengenai pengelolaan gaji tersebut diatas, serta verifikasi secara online berkaitan dengan hasil kalkulasi data gaji PNS, perlu dikembangkan aplikasi penggajian yang dapat digunakan untuk mengakomodir mekanisme usulan mutasi data penggajian dari seluruh SKPD ke BKD. Cetakan daftar gaji yang dapat diakses secara online sehingga SKPD dapat melakukan verifikasi hasil kalkulasi gaji dimaksud secara langsung dengan demikian Daftar Gaji yang tercetak sudah sesuai dengan apa yang diusulkan dari SKPD

Dengan pengembangan aplikasi dimaksud diharapkan dapat menjadi salah satu pemecahan masalah dalam pengelolaan penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam akurasi data gaji dan Tambahan Penghasilan yang ada pada database gaji sama dengan data pencairan gaji dan tambahan penghasilan pada Biro Keuangan.

## B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pedoman Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/000810 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Negeri, Penyesuaian standadisasi Honorarium PNS dan Non PNS, Serta Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 Nomor 3661/DPA/2015 tanggal 2

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### Maksud

Pembuatan Aplikasi Gaji Online Kegiatan Pengembangan Sistem Data Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi implementasi sistem dan menghasilkan data kepegawaian dan data penggajian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih tepat dan akurat demi terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran dalam pengelolaan penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### Tujuan

1. Terlaksananya standar baku struktur data dan pelaporan SIMPEG khususnya data penggajian;
2. Terciptanya kondisi data kepegawaian dan data penggajian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang up to date dan akuntabel;
3. Efisiensi waktu mekanisme pengusulan mutasi gaji dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke BKD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kelancaran proses penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku.

### D. METODE KERJA

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian khususnya pembuatan Aplikasi Gaji Online untuk memfasilitasi usulan mutasi gaji dan tambahan penghasilan serta proses verifikasi terhadap hasil kalkulasi gaji yang dituangkan dalam cetakan daftar dan rekap dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk tahapan-tahapan kegiatan dengan metode pendampingan penyedia jasa, yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim Perancangan/Desain Sistem;
2. Tim Pembuatan/Pemrograman Aplikasi;
3. Tim Testing Aplikasi
4. Pelaporan.

## E. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya aplikasi Gaji Online ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan modul-modul aplikasi berbasis web base melalui tahap-tahap analisis, desain, coding, uji coba dan implementasi.

Adanya koordinasi dalam satu kelompok kerja antara Penyedia jasa dan Tim Teknis dari BKD Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar dapat merancang dan membangun aplikasi sesuai maksud dan tujuan yang diharapkan dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

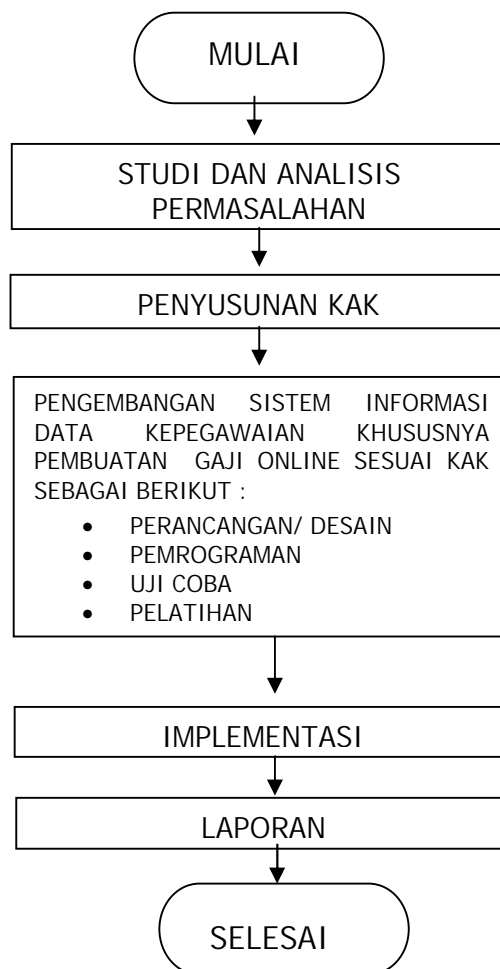
1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna jasa
2. Merancang arsitektur, sistem informasi yang mencakup struktur sistem, rancangan data yang akan diproses dan model database, rancangan software aplikasi, rancangan integrasi sistem dan informasi yang dihasilkan.
3. Menyusun hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak.
4. Mendukung interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
5. Menerapkan dan melakukan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik.
6. Melakukan instalasi aplikasi pada server di NOC (Network Operating Centre)
7. Menentukan Tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing
8. Menyediakan segala fasilitas yang terkait yang dibutuhkan selama kegiatan.
9. Menyusun tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah yang merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi.
10. Menyusun jadwal kerja pada tiap tahapan
11. Melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan dengan selalu melakukan dokumentasi dan pelaporan dari tiap tahapan.
12. Melaksanakan pelatihan dan asistensi seluruh modul dan software yg dibuat kepada pengguna dan administrator.
13. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dan peralatan pendukung pekerjaan.

## F. PERANCANGAN SISTEM

### 1. Metodologi

Metodologi dan Pendekatan yang dipergunakan dalam Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah khususnya aplikasi Gaji Online dan penambahan modul-modul pada sub sistem penggajian untuk memfasilitasi usulan mutasi gaji dari seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan memperhatikan teknologi terbaru yang berkembang pada saat ini, dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan kecermatan dalam perhitungan dan pencarian data.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian dilaksanakan dalam bentuk pembuatan sebuah program aplikasi berbasis web base melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



2. Komponen Sistem :
  - a. Arsitektur sistem : berbasis web base
  - b. Database MySQL dan Pemrograman dengan PHP
  - c. Server Aplikasi (Operating System Linux)
3. Modul Aplikasi

#### Desain Utama Program Aplikasi Gaji Online

##### a. Halaman Login

Setiap user login mempunyai tipe user yang menentukan hak akses terhadap modul-modul yang ada. Antara lain

###### ➤ Administrator

Memiliki semua hak akses, manajemen pengguna, manajemen setting aplikasi dan database

###### ➤ User BKD Provinsi Jawa Tengah

###### ✓ User Operator Khusus

Memiliki hak untuk cari, verifikasi, input, update, data gaji dan tambahan penghasilan, kalkulasi gaji keseluruhan atau per SKPD dan gaji personal PNS, cetak data penggajian seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

###### ✓ User Operator biasa

Memiliki hak untuk cari, verifikasi, input, update data gaji kecuali NIP, kalkulasi gaji perorang

###### ➤ User SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

✓ Memiliki hak untuk verifikasi daftar gaji, input usulan dan cetak perubahan data gaji dan tambahan penghasilan, cetak daftar gaji dan tambahan penghasilan di lingkungan SKPD masing-masing

##### b. Halaman Utama

###### ➤ Opsi penggunaan modul gaji atau modul tambahan penghasilan

###### ✓ Modul Gaji

###### 1. User Administrator

- User Operator BKD User info
- Periode proses gaji
- Kalkulasi data gaji semua
  - Kalkulasi gaji semua atau per SKPD per periode
  - Kalkulasi gaji semua atau per SKPD periode sebelumnya
  - Kalkulasi gaji ke 13 semua atau per SKPD
  - Kalkulasi Tambahan Penghasilan ke 13
- Kalkulasi personal
- Cetak Gaji (dalam format PDF dan HTML)
  - Cetak gaji bulanan (daftar dan rekap)
  - Cetak gaji ke 13 (daftar dan rekap)



- Mutasi data gaji
  - Data Pegawai (cari, input, update, delete)
  - Cetak update semua user
  - Cetak penambahan semua user
- Setting tabel yang digunakan
  - Tabel lokasi
  - Tabel Eselon
  - Tabel Fungsional
  - Tabel Pendidikan
  - Tabel Kedudukan
  - Tabel Taperum/Potongan
  - Tabel Tunjangan Fungsional
  - Tabel Tunjangan umum
  - Tabel Tambahan Penghasilan Struktural
  - Tabel Tambahan Penghasilan fungsional
- Setting administrator
  - Setting user
  - Setting Periode proses gaji
  - Setting gaji pokok
  - Setting aplikasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku
  - Setting Web service untuk terkoneksi dengan aplikasi lainnya
- Form Verifikasi update data gaji semua user  
 Memuat informasi NIP, nama user SKPD yang diampu, status akhir proses verifikasi usulan SKPD yang diampu, tanggal verifikasi guna proses kalkulasi
- Form verifikasi SKPD terhadap daftar gaji  
 Memuat NIP, nama user SKPD, status verifikasi, keterangan koreksi, tanggal verifikasi, guna proses pencetakan
- Export data gaji per periode untuk stakeholder
  - Export data ADK Detail, ADK Rekap yang mencakup elemen data yang dipersyaratkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (dalam format excel dan csv)
  - Export data untuk BPJS kesehatan
  - Export data untuk BPJS Ketenagakerjaan
  - Export data untuk Taspen
  - Export data untuk rekonsiliasi data dengan Biro Keuangan
  - Export data untuk BPK dan BPKP

## 2. User BKD Provinsi Jawa Tengah

### 2.1 User Operator Khusus

- User info
- Periode proses gaji
- Kalkulasi data gaji semua
  - Kalkulasi gaji semua atau per SKPD per periode
  - Kalkulasi gaji semua atau per SKPD periode sebelumnya per periode
  - Kalkulasi gaji ke 13 semua atau per SKPD
  - Kalkulasi Tambahan Penghasilan ke 13
- Kalkulasi personal
- Cetak Gaji
  - Cetak gaji bulanan (daftar dan rekap)
  - Cetak gaji ke 13 (daftar dan rekap)
- Mutasi data gaji
  - Data Pegawai (cari, input, update, delete)
  - Cetak update
  - Cetak penambahan
- Setting tabel yang digunakan
  - Tabel lokasi
  - Tabel Eselon
  - Tabel Fungsional
  - Tabel Pendidikan
  - Tabel Kedudukan
  - Tabel Taperum/Potongan
  - Tabel Tunjangan Fungsional
  - Tabel Tunjangan umum
- Form Verifikasi update data gaji semua user  
Memuat informasi nama user SKPD yang diampu, status akhir proses verifikasi usulan SKPD yang diampu, tanggal verifikasi, guna proses kalkulasi
- Form verifikasi SKPD terhadap daftar gaji  
Memuat NIP, nama user SKPD, status verifikasi, keterangan koreksi, tanggal verifikasi, guna proses pencetakan

### 2.2 User Operator Biasa

- User info
- Periode proses gaji
- Kalkulasi personal
- Mutasi data gaji

- Data Pegawai (cari, input, update kecuali NIP)
- Cetak update lingkup user itu sendiri
- Cetak penambahan lingkup user itu sendiri

### 3. User Operator SKPD

- Cari data gaji PNS di lingkup masing-masing SKPD
- Cetak Daftar gaji beserta rekap (sesuai dengan SKPDnya) dalam format PDF dan HTML
- Input dan cetak Usulan data mutasi gaji per periode gaji
- Form verifikasi SKPD terhadap daftar gaji

## ✓ Modul Tambahan Penghasilan

### 1. User Administrator

- User Operator BKD User info
- Periode proses tambahan penghasilan
- Mutasi data tambahan penghasilan
  - Data Pegawai (cari, input, update, delete)
  - Cetak update semua user
  - Cetak penambahan semua user
- Cetak Tambahan Penghasilan (dalam format PDF dan HTML)
  - Cetak tambahan penghasilan bulanan (daftar dan rekap)
  - Cetak tambahan penghasilan ke 13 (daftar dan rekap)
- Setting administrator
  - Setting user
  - Setting Periode Tambahan Penghasilan
  - Setting aplikasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- Menu Tunjangan berisi Tabel Daftar Tambahan Penghasilan
- Form Verifikasi update data tambahan penghasilan semua user  
 Memuat informasi NIP, nama user SKPD yang diampu, status akhir proses verifikasi usulan tambahan penghasilan SKPD yang diampu, tanggal verifikasi guna proses kalkulasi
- Form verifikasi SKPD terhadap daftar tambahan penghasilan  
 Memuat NIP, nama user SKPD, status verifikasi, keterangan koreksi, tanggal verifikasi, guna proses pencetakan
- Export data tambahan penghasilan per periode untuk stakeholder
  - Export data untuk BPK dan BPKP

## 2. User BKD Provinsi Jawa Tengah

### 2.1 User Operator Khusus

- User Operator BKD User info
- Periode proses tambahan penghasilan
- Mutasi data tambahan penghasilan
  - Data Pegawai (cari, input, update, delete)
  - Cetak update semua user
  - Cetak penambahan semua user
- Cetak Tambahan Penghasilan (dalam format PDF dan HTML)
  - Cetak tambahan penghasilan bulanan (daftar dan rekap)
  - Cetak tambahan penghasilan ke 13 (daftar dan rekap)
- Menu Tunjangan berisi Tabel Daftar Tambahan Penghasilan
- Form Verifikasi update data tambahan penghasilan semua user  
Memuat informasi NIP, nama user SKPD yang diampu, status akhir proses verifikasi usulan tambahan penghasilan SKPD yang diampu, tanggal verifikasi guna proses kalkulasi
- Form verifikasi SKPD terhadap daftar tambahan penghasilan  
Memuat NIP, nama user SKPD, status verifikasi, keterangan koreksi, tanggal verifikasi, guna proses pencetakan

### 2.2 User Operator Biasa

- User Operator BKD User info
- Periode proses tambahan penghasilan
- Mutasi data tambahan penghasilan
  - Data Pegawai (cari, input, update)
  - Cetak update lingkup user itu sendiri
  - Cetak penambahan lingkup user itu sendiri
- Menu Tunjangan berisi Tabel Daftar Tambahan Penghasilan
- Form Verifikasi update data tambahan penghasilan lingkup user itu sendiri
  - Memuat informasi NIP, nama user SKPD yang diampu, status akhir proses verifikasi usulan tambahan penghasilan SKPD yang diampu, tanggal verifikasi guna proses kalkulasi

### 3. User Operator SKPD

- Cari data tambahan penghasilan PNS di lingkup masing-masing SKPD
- Cetak Daftar Tambahan Penghasilan beserta rekap (sesuai dengan SKPDnya) dalam format PDF dan HTML
- Input dan cetak Usulan data mutasi tambahan penghasilan per periode tambahan penghasilan
- Form verifikasi SKPD terhadap daftar tambahan penghasilan

Integrasi modul usulan prosentase Tambahan Penghasilan dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Aplikasi e-Gaji sebagai dasar Perhitungan Pajak Tambahan Penghasilan dan Penghasilan yang dibayarkan

## G. KELUARAN KEGIATAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Aplikasi Gaji Online yang dapat diakses seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Aplikasi Gaji Online untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dilakukan proses perhitungan gaji dan tambahan penghasilan yang cepat, tepat dan akurat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku mengenai penggajian demi terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang profesional khususnya dalam penggajian;
3. Dokumentasi yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, antara lain kebutuhan sistem, desain sistem, konfigurasi sistem dan arsitektur program;
4. Program dengan Source Code;
5. Dokumentasi seluruh sistem dan perangkat lunak berupa buku manual;
6. Instalasi aplikasi;
7. Pelatihan, pendampingan/asistensi, garansi dan pemeliharaan.

Media dokumentasi pada proyek ini dibuat dalam format softcopy dan hardcopy. Format yang digunakan dalam dokumentasi dalam bentuk softcopy adalah menggunakan standar format MS. Office atau PDF. Dokumen yang diserahkan tersebut harus merupakan versi final dari aplikasi yang telah dikembangkan/dibangun melalui tahapan pengujian dan integrasi sistem aplikasi.

## H. KEBUTUHAN PERSONIL & PERALATAN

Untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan dibagi menjadi kelompok kerja (tim), yaitu :

1. Tim Teknis Perancangan
2. Tim Teknis Pemrograman
3. Tim Evaluasi

Untuk kebutuhan tersebut, maka diperlukan spesifikasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME				KEBUTUHAN	
		JML	SAT	WKT	SAT	SPESIFIKASI	KET
I	Biaya Langsung Personel						
A.	Tim Teknis						
	• Team Leader	1	Org	1.5	Bln	S2-Teknik Informatika S1-Teknik Informatika	Min 2 Thn Min 5 Thn
	• Sistem Analis	1	Org	1.5	Bln	S1-Sistem Informatika	Min 2 Thn
	• Database Specialist	1	Org	1.5	Bln	S1-Teknik Informatika	Min 2 Thn
	• Programmer	2	Org	1.5	Bln	S1-Teknik Informatika/Sistem Infomasi	Min 2 Thn
	• Ahli Jaringan Komputer	1	Org	1.5	Bln	S1-Teknik Informatika	Min 2 Thn
	• Ahli Akuntansi	1	Org	1.5	Bln	S1-Akuntansi	Min 2 Thn
B.	Tenaga Penunjang						
	• Tester	1	Org	1.5	Bln	Min D3 Komputer	Min 2 Thn
	• Administrasi	1	Org	1.5	Bln	Min D3	Min 2 Thn
II	Biaya Langsung Non Personel						
A.	Pelatihan	1	Pkt				
B.	Pelaporan						
	• Laporan Pendahuluan	10	Buku				
	• Laporan Akhir	10	Buku				
	• Manual Book	10	Buku				
	• CD Master	5	CD				

Uraian Tugas Tim Teknis Aplikasi masing-masing personel, sebagai berikut :

1. Tenaga Ketua Tim (Team Leader), bertugas memimpin tim, bertanggung jawab atas koordinasi tim serta integrator sistem meliputi aplikasi dan jaringan komputer.

2. Tenaga Ahli Sistem Analis, bertugas sebagai perancang desain input, desain proses serta desain output
3. Tenaga Ahli Programmer/Application Development, bertugas sebagai penerjemah rancangan kedalam script/ coding bahasa pemrograman.
4. Tenaga Ahli Database Specialist, bertugas membuat desain database.
5. Tenaga Ahli Jaringan bertugas mengimplementasikan jaringan yang digunakan
6. Tenaga Ahli Akuntansi, bertugas menterjemahkan aturan penggajian kedalam rumus perhitungan

Melaksanakan pelatihan dengan trainer yang disediakan oleh Penyedia Jasa dan diambilkan dari tenaga pada Penyedia Jasa dan Bukan merupakan anggota Tim Ahli, yang pada saat pembuatan aplikasi tersebut selalu mengikuti dengan tugas antara lain :

- Mengikuti ujicoba operasional dan menyusun referensi teknis, panduan dan pelatihan bagi para calon pengguna mengenai pengoperasian program aplikasi
- Memberikan pelatihan kepada pengguna

#### I. JADWAL PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai tahapan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pebruari 2015		Maret 2015			
		III	IV	I	II	III	IV
1.	Kontrak	X					
2.	Analisis dan Perancangan Sistem	X	X	X	X	X	X
3.	Pemrograman	X	X	X	X	X	X
4.	Ujicoba				X	X	X
5.	Pelatihan						X
6.	Pelaporan		X				X

#### J. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pengembangan Aplikasi Gaji Online Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian dibebankan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 DPA Nomor : 3661/DPA/2015 TANGGAL 2 Januari 2015 dengan kode rekening 1.20.1.20.10.27.0024.5.2.2.21.05 mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

#### K. TEMPAT

Tempat Penyerahan hasil Pembuatan Aplikasi Gaji Online Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian adalah di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang.

## L. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dalam bahasa Indonesia, meliputi:

1. Laporan Pendahuluan, berisi :

- a. Metodologi/Rencana pelaksanaan pekerjaan;
- b. Alokasi Tim Ahli dan tenaga pendukung lainnya;
- c. Jadwal kegiatan penyedia jasa.
- d. Desain awal aplikasi

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

2. Laporan Akhir, berisi :

- a. Memuat seluruh proses kegiatan dan pertanggungjawaban karena telah selesainya tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilakukan;
- b. Dokumentasi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem ini.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

## M. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Aplikasi Gaji Online Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian, Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga BKD Provinsi Jawa Tengah dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama dalam pengelolaan Data Kepegawaian dan Data Penggajian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2015  
KEPALA BIDANG DOKLAHTA

NING TJAHYO KUSUMASTUTI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601104 198608 2 001



